

## DAFTAR PUSTAKA

Republik Indonesia. Undang-Undang Dasar 1945.

- \_\_\_\_\_. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian.
- \_\_\_\_\_. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil.
- \_\_\_\_\_. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang no. 36 tahun 2004 tentang APBN tahun 2005.
- \_\_\_\_\_. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang no. 1 tahun 2005 tentang Penangguhan Mulai Berlakunya Undang-Undang no. 2 tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Menjadi Undang-Undang.
- \_\_\_\_\_. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional.
- \_\_\_\_\_. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2005 tentang Pembentukan Pengadilan Tinggi Agama Banten.
- \_\_\_\_\_. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2005 tentang Pembentukan Pengadilan Tinggi Agama Kepulauan Bangka Belitung.
- \_\_\_\_\_. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pembentukan Pengadilan Tinggi Agama Gorontalo.
- \_\_\_\_\_. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2005 tentang Pembentukan Pengadilan Tinggi Agama Maluku Utara.
- \_\_\_\_\_. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 3 tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang no. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang.
- \_\_\_\_\_. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2005 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 36 tahun 2004 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tahun Anggaran 2005.



- \_\_\_\_\_. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang no. 2 tahun 2005 tentang Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Wilayah dan Kehidupan Masyarakat Propinsi Naggroe Aceh Darussalam dan Kepulauan Nias Propinsi Sumatra Utara Menjadi Undang-Undang.
- \_\_\_\_\_. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pengesahan international covenant on economic, social and cultural rights (kovenan internasional tentang Hak-hak ekonomi, sosial dan budaya).
- \_\_\_\_\_. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan international covenant on civil and political rights (kovenan internasional tentang hak-hak sipil dan politik).
- \_\_\_\_\_. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2005 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2006.
- \_\_\_\_\_. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.
- \_\_\_\_\_. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2006 tentang Bantuan Timbal Balik Dalam Masalah Pidana.
- \_\_\_\_\_. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2006 tentang Perhitungan Anggaran Negara Tahun 2003.
- \_\_\_\_\_. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas undang-undang no 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama.
- \_\_\_\_\_. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2006 tentang Pengesahan International treaty on plant genetic resources for food and agriculture.
- \_\_\_\_\_. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2006 tentang Pengesahan international convention for the supression of the terrorist bombings 1997.
- \_\_\_\_\_. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengesahan International convention for the supression of the financing of terrorism 1999.
- \_\_\_\_\_. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pengesahan United Nations Convention against corruption 2003.
- \_\_\_\_\_. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pengesahan perjanjian antara Republik Indonesia dengan Republik Rakyat Cina mengenai bantuan hukum dan timbal balik masalah pidana.
- \_\_\_\_\_. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2006 tentang Sistem Resi Gudang.
- \_\_\_\_\_. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2006 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2006 Tentang



Perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 12 Tahun 2003 Tentang pemilihan anggota DPR, Dewan Perwakilan Daerah, dan DPRD menjadi Undang-Undang.

- \_\_\_\_\_ . Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh.
- \_\_\_\_\_ . Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia.
- \_\_\_\_\_ . Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.
- \_\_\_\_\_ . Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2006 tentang Perubahan atas undang-undang no. 13 tahun 2005 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2006.
- \_\_\_\_\_ . Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan.
- \_\_\_\_\_ . Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan.
- \_\_\_\_\_ . Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-undang no. 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan.
- \_\_\_\_\_ . Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2006 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2007.
- \_\_\_\_\_ . Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2006 tentang Dewan Pertimbangan Presiden.
- \_\_\_\_\_ . Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2006 tentang Pengesahan Convention on the Prohibition of the use, stockpiling, Production and Transfer of Anti-Personnel Mines, and on their destruction.
- \_\_\_\_\_ . Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2006 tentang Pengesahan persetujuan antara pemerintah Indoneisa dengan pemerintah republik India tentang kegiatan kerja sama di bidang pertahanan.
- \_\_\_\_\_ . Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2006 tentang Pertanggungjawaban atas pelaksanaan APBN 2004.
- \_\_\_\_\_ . Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.
- \_\_\_\_\_ . Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kab. Empat Lawang Prov. Sumatera Selatan.
- \_\_\_\_\_ . Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kab. Nagekeo Prov. Nusa Tenggara Timur.



- \_\_\_\_\_ . Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kab. Sumba Tengah Prov. Nusa Tenggara Timur.
- \_\_\_\_\_ . Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pembentukan kota Kotamobagu Prov. Sulawesi Utara.
- \_\_\_\_\_ . Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kab. Batu Bara prov. Sumatera Utara.
- \_\_\_\_\_ . Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kab. Kayong Utara di Prov. Kalimantan Barat.
- \_\_\_\_\_ . Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kab. Pidie Jaya di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.
- \_\_\_\_\_ . Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2007 tentang Pembentukan kota Subulussalam di provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.
- \_\_\_\_\_ . Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Minahasa Tenggara.
- \_\_\_\_\_ . Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kab. Bolang Mongondow Utara Prov. Sulawesi Utara.
- \_\_\_\_\_ . Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kab. Gorontalo Utara Prov. Gorontalo.
- \_\_\_\_\_ . Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kab. Konawe Utara Prov. Sulawesi Tenggara.
- \_\_\_\_\_ . Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kab. Bandung Barat, Prov. Jawa Barat.
- \_\_\_\_\_ . Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kab. Buton Utara, Prov. Sulawesi Tenggara.
- \_\_\_\_\_ . Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kab. Siau Tagulandang Biaro.
- \_\_\_\_\_ . Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kab. Sumba Barat Daya Prov. Nusa Tenggara Timur.
- \_\_\_\_\_ . Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025.
- \_\_\_\_\_ . Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2007 tentang Pengesahan Persetujuan antara Pemerintah Indonesia dengan Pemerintah Sosialis Vietnam Tentang Penetapan Batas Landas Kontinen 2003.



- \_\_\_\_\_ . Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kab. Mamberamo Raya, Prov. Papua.
- \_\_\_\_\_ . Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2007 tentang Pengesahan Persetujuan antara Pemerintah Indonesia dengan Pemerintah Filipina tentang Kegiatan Kerja Sama di Bidang Pertahanan dan Keamanan.
- \_\_\_\_\_ . Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.
- \_\_\_\_\_ . Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pemilu.
- \_\_\_\_\_ . Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian.
- \_\_\_\_\_ . Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana.
- \_\_\_\_\_ . Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal.
- \_\_\_\_\_ . Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang.
- \_\_\_\_\_ . Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.
- \_\_\_\_\_ . Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang nomor 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.
- \_\_\_\_\_ . Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- \_\_\_\_\_ . Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2007 tentang Energi.
- \_\_\_\_\_ . Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kota Tual di Maluku.
- \_\_\_\_\_ . Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kota Serang di Provinsi Banten.
- \_\_\_\_\_ . Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Pesawaran di Provinsi Lampung.
- \_\_\_\_\_ . Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Tana Tidung di Provinsi Kalimantan Timur.
- \_\_\_\_\_ . Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Kubu Raya di Provinsi Kalimantan Barat.



- \_\_\_\_\_ . Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Manggarai Timur di Provinsi Nusa Tenggara Timur.
- \_\_\_\_\_ . Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Padang Lawas Utara di Provinsi Sumatera Utara
- \_\_\_\_\_ . Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Padang Lawas di Provinsi Sumatera Utara.
- \_\_\_\_\_ . Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Undang-Undang nomor 11 tahun 1995 tentang Cukai.
- \_\_\_\_\_ . Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
- \_\_\_\_\_ . Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1997 tentang Kemitraan.
- \_\_\_\_\_ . Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1994 tentang Pendirian dan Perubahan Anggaran Dasar Koperasi.
- \_\_\_\_\_ . Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1994 tentang Pembubaran Koperasi oleh Pemerintah.
- \_\_\_\_\_ . Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1995 tentang Kegiatan Usaha Simpan Pinjam.
- \_\_\_\_\_ . Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 1998 tentang Modal Penyertaan pada Koperasi.
- \_\_\_\_\_ . Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1998 tentang Pembinaan dan Pengembangan Usaha Kecil.
- \_\_\_\_\_ . Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom.
- \_\_\_\_\_ . Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Periode Tahun 2004 – 2007.
- \_\_\_\_\_ . Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2005 tentang RPJM Tahun 2004 – 2009.
- \_\_\_\_\_ . Peraturan Presiden Republik Indonesia Periode Tahun 2004 - 2007
- \_\_\_\_\_ . Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1999 Tentang Pemberdayaan Usaha Menengah.
- \_\_\_\_\_ . Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1998 tentang Peningkatan Pembinaan dan Pengembangan Perkoperasian.
- \_\_\_\_\_ . Instruksi Presiden Republik Indonesia Periode Tahun 2004 – 2007.
- \_\_\_\_\_ . Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 127 tahun 2001 tentang Bidang/Jenis Usaha yang Dicadangkan untuk Usaha kecil dan



Bidang/Jenis Usaha yang Terbuka untuk Usaha Menengah atau Besar dengan Syarat Kemitraan.

\_\_\_\_\_ . Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 56 tahun 2002 Tentang Restrukturisasi Kredit Usaha Kecil dan Menengah.

\_\_\_\_\_ . Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2006 tentang UKP3R.

\_\_\_\_\_ . Keputusan Presiden Republik Indonesia Periode Tahun 2004 – 2007

\_\_\_\_\_ . Keputusan Menteri Koperasi dan UKM Periode Tahun 2000 – 2007.

\_\_\_\_\_ . Peraturan Menteri Koperasi dan UKM Periode Tahun 2005 – 2007.

\_\_\_\_\_ . Berbagai Peraturan Menteri Terkait Periode Tahun 2005 – 2007.

\_\_\_\_\_ . Peraturan Daerah Pemerintah Propinsi Jawa Timur Nomor 4 tahun 2007 tentang Pemberdayaan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.

\_\_\_\_\_ . Peraturan Daerah Pemerintah Propinsi Jawa Timur Periode Tahun 2004 – 2007

\_\_\_\_\_ . Peraturan Daerah Pemerintah Propinsi Riau Periode Tahun 2004 – 2007

\_\_\_\_\_ . Peraturan Daerah Pemerintah Propinsi DI Yogyakarta Tahun 2004 – 2007

\_\_\_\_\_ . Peraturan Daerah Pemerintah Propinsi Kalimantan Barat Tahun 2004 – 2007.

\_\_\_\_\_ . Peraturan Daerah Pemerintah Propinsi Sulawesi Utara Tahun 2004 – 2007.

\_\_\_\_\_ . Peraturan Daerah Pemerintah Propinsi Maluku Tahun 2004 – 2007.

Aaker, David A. 1996. Building Strong Brands. Simon & Schuster Inc., New York.

Aaker, Jennifer .L.1997. Dimensions of Brand Personality, Journal of Marketing Research, Vol. 34 No. August, pp.347-56.

Agung Nur Fajar 2006. Percepatan Pemberdayaan UKMK: Suatu Kebutuhan?. ACG Advisory Group, Jakarta

Agung Nur Fajar. 2004. Peran Stratejik Pemberdayaan Koperasi dan UMKM. Public Policy: Jurnal Ekonomi Politik

Agung Nur Fajar. 2001. Model Pemberdayaan Koperasi dan UMKM. ACG-Advisory Goup, Jakarta



- ADB SME Development TA Indonesia. 2002. *Praktek Terbaik dalam Menciptakan Suatu Lingkungan yang Kondusif Bagi UKM*. Kementerian Koperasi dan UKM, Jakarta.
- ADB SME Development TA Indonesia. 2002. *Rencana Tindak Jangka Menengah Pengembangan UKM : Strategi dan Rekomendasi*. Kementerian Koperasi dan UKM, Jakarta.
- Anderson, James E. 2000. *Publik Policy Making*. Houghton Mifflin, Boston.
- Austin, Ian. 2001. *Pragmatism and Public Policy in East Asia: Origins, Adaptations, and Developments*. Times, Singapore.
- BPS dan Kementerian KUKM. 2006. *Indikator Makro UKM*, Jakarta.
- BPS dan Kementerian KUKM. 2007. *Indikator Makro UKM*, Jakarta.
- Kementerian Koperasi dan UKM. 2007. *Statistik Perkoperasian*, Jakarta
- De Bono, E. 1985. *Six Thinking Hats*. Penguin Books Ltd., London.
- Departement of the Taoiseach Government Buildings, 2005, *RIA GUIDELINES: How to Conduct a Regulatory Impact Analysis*, Dublin.
- Dunn, William N. 1999. *Analisis Kebijakan Publik*. UGM Press, Yogyakarta.
- Dwidjowijoto, Riant Nugroho. 2003. *Kebijakan Publik : Perumusan, Implementasi, Evaluasi*. Elex Media Komputindo, Jakarta.
- Dwidjowijoto, Riant Nugroho. 2006. *Analisis Kebijakan*. Elex Media Komputindo, Jakarta.
- Dwidjowijoto, Riant Nugroho. 2006. *Kebijakan Publik untuk Negara-negara Berkembang*. Elex Media Komputindo, Jakarta.
- Firmansyah, 2001. *Dinamika Usaha Kecil dan Menengah*. Pusat Penelitian Ekonomi –LIPI, Jakarta.
- Hill, Michael. 2005. *The Public Policy Process 4th edition*. Pearson-Longman, London.
- Hill, Michael & Peter Hupe. 2006. *Implementing Public Policy*. Sage, London.
- Iida, Akira. 2004. *Paradigm Theory & Policy Making : Reconfiguring the Future*. Tuttle, Tokyo.
- Iskandar Soesilo, Wayan Suarja dan kawan-kawan. 2007. *Moral Pemberdayaan Koperasi dan UMKM (draf)*. Kementerian Koperasi dan UKM.
- Kelly, Kevin. 1998. *New Rules for The New Economy : Ten Ways the Network Economy Is Changing Everything*. Fourth Estate, London.



- Kementerian Koperasi dan UKM Republik Indonesia. 2003. Ekonomi Kerakyatan Dalam Kanca Globalisasi, Jakarta.
- Kementerian Koperasi dan UKM Republik Indonesia. 2004. Rencana Strategis Pembangunan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Periode Tahun 2005-2009, Jakarta.
- Krisnamurthi B., 2004. Strategi Pengembangan Pembiayaan untuk Mengurangi Kemiskinan Di Pertanian. Perhepi, Jakarta.
- Krisnamurthi B., 2003. Pengembangan Lembaga Keuangan Mikro. Pusat Studi Pembangunan IPB, Bogor.
- Lester, James P. & Joseph Stewart Jr. 2000. Public Policy : An Evolutionary Approach. Wadsworth, Belmont.
- Lewin, Kurt. 1951. Field theory in social science; selected theoretical papers. D. Cartwright (ed.). Harper & Row, New York.
- Masngudi, H. 1990. Penelitian Tentang Sejarah Perkembangan Koperasi di Indonesia. Departemen Koperasi, Jakarta.
- Ministry for Cooperative and SMEs the Republic of Indonesia, 2003. Integrated Plan of Actions For SME Development in Indonesia, Jakarta.
- Office of Best Practice Regulation. November 2006. Best Practice Regulation Handbook, Canberra.
- Parson, Wayne. 2005 (2001). Public Policy : Pengantar Teori dan Praktik Analisis Kebijakan. Prenada Media.
- Porter, Michael E. 1998 (1990). The Competitive Advantage of Nations. Simon & Schuster Inc., New York.
- Prahald, C.K.. 2006. The Fortune at The Bottom of The Pyramid. Wharton School Publishing, Pennsylvania.
- Pusat Penelitian dan Pengembangan Ekonomi dan Pembangunan-LIPI, 2001. Dinamika Usaha Kecil dan Rumah Tangga, Jakarta.
- Senge, Peter M. 1994. The Fifth Discipline : The Art and Practice of The Learning Organization. Currency Doubleday, New York.
- Stiglitz, Joseph E. 2007. Making Globalization Network : Menyiasati Globalisasi Menuju Dunia yang Lebih Adil. Mizan, Jakarta.
- Suharto, Edi. 2005. Analisis Kebijakan Publik : Panduan Praktis Mengkaji Masalah dan Kebijakan Sosial. Alfabeta, Bandung.



- Tjokroamidjojo, Bintoro. 2000. Kertas Kerja Good Governance :Paradigma Baru Manajemen Pembangunan. Jakarta.
- Wahab, Solichin Abdul. 2002. Analisis Kebijaksanaan : Dari Formulasi ke Implementasi Kebijaksanaan Negara. Sinar Grafika , Jakarta.
- Weimer, David L. & Aidan R.Vining.1999.Policy Analysis : Concepts and Practice. Prentice Hall, New Jersey.
- Winarno, Budi. 2002. Teori dan Proses Kebijakan Publik. Media Presindo, Yogyakarta.